

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu dimasa mendatang. berdasarkan defenisi tersebut kita dapat menyimpulkan perencanaan merupakan syarat bagi terlaksananya pembangunan yang baik. Namun, perencanaan yang matang belum tentu membuat pembangunan itu berhasil di karenakan adanya pelaksanaan kegiatan yang mungkin saja masih ditemukannya hambatan-hambatan yang dapat menghambat proses pembangunan. Maka dari itu Hambatan-hambatan tersebut harus benar-benar diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena pembangunan yang diharapkan hendaknya dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. (D .Conyers and Hills,1984)

Rencana Peningkatan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja OPD berfungsi sebagai pendukung strategis bagi program pembangunan tahunan pemerintah daerah karena merupakan dokumen perencanaan tahunan Organisasi Perangkat Daerah. Renja OPD disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan masyarakat. Standar dalam kesiapan rancangan Renja SKPD adalah: Mengacu pada Renstra SKPD dan rancangan awal, program dan kegiatan yang direncanakan mencakup tolok ukur dan sasaran kinerja, keluaran (output), biaya satuan per belanja, dan total kebutuhan dana untuk tahun ke-n dan tahun ke-n-1. (Renja, 2022)

Beberapa kendala yang ditemukan selama proses penyusunan Renja di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

1. Keterbatasan anggaran daerah menyebabkan alokasi dana dari pemerintah untuk setiap SKPD tidak memadai.
2. Perubahan-perubahan keputusan yang dilakukan setelah Renja ditetapkan.
3. Tidak adanya dukungan dari kabupaten dan kota untuk kegiatan provinsi.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan penyusunan rencana kerja yaitu : Persiapan Penyusunan Renja, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan Renja, Pelaksanaan Forum Peragkat Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir, Penetapan Renja

Dengan adanya tahapan dan tata cara penyusunan rencana kerja maka program/kegiatan yang akan dilaksanakan lebih terarah, sehingga diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya tumpang tindih.

Seperti yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk membuat tugas akhir yang berjudul **“TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaiman Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renja pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
2. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyusunan rencana kerja.

### **1.3 Tujuan Penulis**

Berdasarkan judul yang penulis ambil yaitu “ Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pada Dinas Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat ” adapun tujuan dari magang ini adalah:

1. Mengetahui Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam realisasi penyusunan Rencana Kerja.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

1. Manfaat bagi Penulis antara lain:
  - a. Dapat menjelaskan pemahaman mengenai Tahapan dan Teknik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
  - b. Sebagai korelasi dalam memberikan informasi yang dapat bermanfaat di kemudian hari
2. Bagi Perguruan Tinggi
  - a) Merupakan dasar dari hubungan yang bermanfaat antara perguruan tinggi dengan organisasi/kantor tempat magang itu sendiri.
  - b) Melalui kerja magang dan pengalaman kerja, universitas dapat meningkatkan kualitas lulusannya dan mendapatkan pengakuan di dunia kerja.

c) Dapat memperjelas pemahaman tentang Tahapan dan Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

### 3. Bagi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Sebagai bahan perbandingan dalam memberikan masukan yang dapat berguna di masa yang akan datang

## 1.5 Metode Penulisan

### 1. Studi keperpustakaan

Yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan bacaan yang mencakup buku teks dan bahan-bahan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas oleh penulis.

### 2. Studi Lapangan

Data yang didapat menggunakan gform dan wawancara dengan karyawan dan pejabat yang berkepentingan.

### 3. Pencarian Melalui Internet

Melakukan pencarian data melalui internet melalui website yang berkaitan dengan judul atau permasalahan yang diangkat oleh penulis yang bertujuan untuk menambah dan melengkapi data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan kerja magang, manfaat, lokasi, dan waktu pelaksanaan, serta pengumpulan data dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Berisi premis hipotetis yang merupakan klarifikasi dari spekulasi pendukung yang digunakan dalam pembahasan tugas akhir. Untuk situasi ini, akan dikaji mengenai tahapan dan teknik penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kelurahan.

### **BAB III GAMBARAN UMUM**

Memberikan gambaran umum tentang sejarah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, serta visi dan misi, struktur organisasi, pembagian tugas dan fungsi, dan kegiatan-kegiatan yang ada di dinas tersebut.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat akan dibahas dalam bab ini.

### **BAB V PENUTUP**

Kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan disajikan pada bab terakhir.